

**EFEKTIFITAS KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

OLEH:

WAHYU RAHMADANI

Bp. 02 193 016



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

ABSTRAK

Wahyu Rahmadani
02 193 016

Efektifitas Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Skripsi ini ingin mendeskripsikan tentang efektifitas kerja Bappeda Kabupaten Rokan Hilir.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektifitas kerja Agus Dharma dalam bukunya Manajemen Supervisi

Untuk pencarian data digunakan pendekatan kuantitatif yakni dengan metode survey dengan memakai jenis penelitian deskriptif dengan satu variabel (*variable univariat*). Skala yang digunakan adalah nominal, tidak menggunakan uji hipotesis tapi menggunakan uji validitas dan reabilitas dengan melihat nilai *Corrected Item - Correlation*. Pengambilan sampel digunakan *Purposive sampling* dengan jumlah total responden 83 orang, dimana 21 orang pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di tambah dengan 62 responden dari dinas PU dan Kimpraswil, Kesehatan, Pendidikan, Koperasi dan UKM, Disperindag, Dispersenbud dan olah raga dan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dari deskripsi mengenai efektifitas kerja Bappeda Kabupaten Rokan Hilir ternyata terdapat kesimpulan bahwa mayoritas dari jumlah total responden menyatakan bahwa efektifitas kerja yang terdapat di Bappeda Kabupaten Rokan Hilir baik.

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah yang luas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah telah terjadi beberapa perubahan yang sangat signifikan di daerah yang direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Diantara perubahan tersebut adalah ditatanya kembali organisasi perangkat daerah (ORKATDA) yang mengacu pada Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003. Perundangan tersebut memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyusun dan menetapkan organisasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan kebutuhan Daerah yang didasarkan kepada pertimbangan kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah, karakteristik, potensi daerah, kemampuan keuangan dan ketersediaan sumber daya aparatur.

Meskipun kebijakan penyusunan SOTK berdasarkan pertimbangan di atas, namun kenyataannya terdapat kecenderungan pemerintahan daerah membentuk organisasi perangkat daerah yang terlalu gemuk dan kurang didasarkan pada kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan. Boleh jadi hal ini disebabkan oleh karena adanya pengambilan keputusan yang bernuansa politis, sehingga

mengabaikan pertimbangan – pertimbangan yang bersifat rasional, objektif, efisiensi dan efektifitas.

Kecenderungan tersebut telah membawa implikasi pada pembengkakan organisasi perangkat daerah secara signifikan. Hal ini tentu saja berpengaruh besar pada efisiensi alokasi anggaran yang tersedia pada masing-masing daerah. Selain itu, juga menimbulkan kurang terintegrasinya penanganan (*institutional Incoherency*), karena fungsi yang seharusnya ditangani dalam satu kesatuan unit harus dibagi ke beberapa unit organisasi yang pada akhirnya mengarah pada ketidak efektifan kerja birokrasi. Kondisi tersebut lebih jauh akan berpotensi pada terjadinya disharmoni bahkan friksi antar unit organisasi sebagai akibat tarik menarik kewenangan termasuk di dalamnya Bappeda Kabupaten Rokan Hilir.

Sejak diimplementasikan otonomi daerah, di Kabupaten Rokan Hilir telah dibentuk susunan organisasi Bappeda berdasarkan Perda No.18 Tahun 2001 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Bappeda Kabupaten Rokan Hilir. Susunan Organisasi dan tata kerja Bappeda Kabupaten Rokan Hilir tersebut terdiri dari:

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari latar belakang, tinjauan pustaka, analisa dan pembahasan mengenai efektifitas kerja bappeda Kabupaten Rokan Hilir, maka didapat kesimpulan sebagai berikut yaitu:

Kuantitas kerja, dapat disimpulkan secara keseluruhan untuk indikator kuantitas kerja dapat dikatakan mempunyai persepsi yang baik. Hal ini terlihat dari sebagian besar (mayoritas) responden memilih persepsi jawaban setuju/pernah/ada pada masing-masing item pertanyaan kuisisioner yang telah diajukan. Namun demikian, ada beberapa pernyataan responden yang bernilai kurang baik yaitu mengenai *masih belum sempurnanya terlaksana program*

Kuantitas kerja, dari sebagian besar persepsi responden yang menjawab item pertanyaan dalam indikator kualitas kerja dapat disimpulkan bahwa, sebagian besar dapat dikatakan baik. Namun ada beberapa hal yang mempunyai jawaban /

nilai yang negatif yaitu, masih kurangnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan *aparatur perencanaan pembangunan daerah di Bappeda*. Disamping itu juga,

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari latar belakang, tinjauan pustaka, analisa dan pembahasan mengenai efektifitas kerja bappeda Kabupaten Rokan Hilir, maka didapat kesimpulan sebagai berikut yaitu:

Kuantitas kerja, dapat disimpulkan secara keseluruhan untuk indikator kuantitas kerja dapat dikatakan mempunyai persepsi yang baik. Hal ini terlihat dari sebagian besar (mayoritas) responden memilih persepsi jawaban setuju/pernah/ada pada masing-masing item pertanyaan kuisisioner yang telah diajukan. Namun demikian, ada beberapa pernyataan responden yang bernilai kurang baik yaitu mengenai masih belum sempurnanya terlaksana program koordinasi, kerjasama maupun konsultasi perencanaan Pembangunan di Bappeda dengan pihak lain. Selain itu juga, ditemukan pula kecenderungan jawaban responden yang menjawab masih kurangnya peningkatan jumlah sarana dan prasarana aparatur di Bappeda itu sendiri.

Kualitas kerja, dari sebagian besar persepsi responden yang menjawab item pertanyaan dalam indikator kualitas kerja dapat disimpulkan bahwa, sebagian besar dapat dikatakan baik. Namun ada beberapa hal yang mempunyai jawaban / nilai yang negatif yaitu, masih kurangnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencanaan pembangunan daerah di Bappeda. Disamping itu juga,

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teori

- Atkinson, R. C, dan E.R. Hilgar. 1991. *Pengantar Psikologi*, diterjemahkan oleh Nurjanah Taufik dan Rukmini. Jakarta: Erlangga.
- Dharma, Agus. 2004. *Manajemen Supervisi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hamzah, Rocmulyati. 1989. *Pengembangan Organisasi*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Indrawijaya, Adam Ibrahim. 1989. *Perilaku Organisasi*. Bandung: CV. Haji Mas Agung.
- M. Steers, Richard. 1985. *Efektifitas Organisasi*. Jakarta: Arcan.
- Nimran, Umar. 1999. *Perilaku Organisasi (Edisi Revisi)*. Surabaya: CV. Citra Media.
- Sedarmayanti. 1996. *Tata Kerja dan Produktifitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Westra, Pariata. 1989. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.

Buku Metodologi

- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Kencana.
- Bungin, Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Gaffar, Affan. 1992. *Javaness Voters*. Jogjakarta: Gajah Mada University Press.
- Nugroho, Bhuono Agung, 2005, *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*, Yogyakarta: AndiYogyakarta.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Singarimbun, Masri. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3S.